

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Penelitian ini diawali dengan menghitung nilai indeks pertumbuhan inklusif kabupaten/kota di Indonesia dari Tahun 2015 sampai 2019. Pengukuran indeks pertumbuhan inklusif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR)* tetapi dengan melakukan sedikit modifikasi terhadap indeks *PEGR*. Pada hakikatnya modifikasi ini tidak meruban inklusifitas pertumbuhan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai indeks pertumbuhan inklusif kabupaten/kota di Indonesia mengalami peningkatan dalam rentang tahun 2015-2019. Rata-rata nilai indeks pertumbuhan inklusif kabupaten/kota di tahun 2015 yaitu sebesar -0,7 sementara itu di tahun 2019 menjadi -0,4702. Dari segi jumlah kabupaten/kota yang mengalami pertumbuhan yang inklusif (nilai indeks lebih besar dari 0) juga meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, hanya 17 kabupaten/kota atau sekitar 3,43% yang mengalami pertumbuhan inklusif. Sedangkan di tahun 2019 ada sebanyak 92 kabupaten/kota atau 17,9% yang mengalami pertumbuhan inklusif.

Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat memiliki rerata indeks pertumbuhan inklusif tertinggi dalam rentang tahun 2015-2019. Sedangkan Kabupaten Berau di Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah yang memiliki rerata indeks terendah pada tahun 2015-2019 dengan nilai rata-rata -0.9865. Perbedaan yang cukup mencolok dari kedua daerah ini adalah dari perubahan ketimpangan. Ketimpangan cenderung meningkat di Kabupaten Berau dalam rentang tahun 2015-2019, sementara itu di Kota Sawahlunto ketimpangan menurun dalam rentang tahun yang sama. Selain itu, pertumbuhan PDRB riil per kapita di Kabupaten Berau juga sempat bernilai negatif di tahun 2016 dan 2018 sedangkan di Kota Sawahlunto pertumbuhan cenderung stabil di kisaran 4 persen tiap tahunnya.

Akses terhadap kredit di lembaga keuangan formal bagi masyarakat dengan pengeluaran 40 persen terbawah terbukti secara empiris menjadikan pertumbuhan lebih inklusif di Indonesia, khususnya di Sumatera, Jawa dan Bali serta Sulawesi.

Ini menandakan bahwa kredit tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat kurang mampu untuk kegiatan yang produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Hal sebaliknya terjadi di Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dimana proksi dari inklusi keuangan ternyata berdampak negatif terhadap pertumbuhan inklusif. Kemungkinan penyebabnya adalah rendahnya literasi pengelolaan keuangan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Temuan ini menegaskan hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh inklusi keuangan di wilayah Indonesia Bagian Barat.

Digitalisasi yang di proksi dengan penggunaan internet oleh masyarakat dengan pengeluaran 40 persen terbawah juga memberi dampak yang positif bagi pertumbuhan inklusif di Indonesia. Pengaruhnya lebih tinggi dibandingkan inklusi keuangan di wilayah Sumatera serta Jawa dan Bali. Sementara itu di wilayah Sulawesi pengaruhnya lebih kecil dibandingkan inklusi keuangan, bahkan pada model 2 dimana variabel pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi tidak dimasukkan pengaruhnya menjadi tidak signifikan. Sedangkan di wilayah Papua pengaruhnya meskipun positif tetapi tidak signifikan baik untuk model 1 maupun model 2.

Variabel kontrol rata-rata lama sekolah ternyata berdampak negatif terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia khususnya di wilayah Jawa dan Bali. Hal ini menandakan ketimpangan pendidikan mengakibatkan ketimpangan pendapatan yang cukup lebar di Indonesia. Sementara itu di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua pengaruhnya positif meskipun tidak signifikan. Ini menandakan bahwa ketimpangan pendidikan tidak menyebabkan ketimpangan pendapatan yang signifikan. Hal ini dikonfirmasi dari penelitian Fahmy *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa pengembalian pendidikan pekerja di Kawasan Timur Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia.

## **B. Saran**

Penelitian ini tentu saja masih banyak memiliki kekurangan dari berbagai aspek. Penelitian ini memfokuskan pengaruh inklusi keuangan dan digitalisasi di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pertumbuhan inklusif. Dalam

beberapa literatur dijelaskan bahwa digitalisasi akan mendorong terjadinya akses ke lembaga keuangan menjadi lebih inklusif dengan hadirnya *financial technology*. Sehingga dirasa perlu ada variabel interaksi di antara digitalisasi dan inklusi keuangan. Tetapi karena tidak tersedianya data maka interaksi keduanya tidak dimasukkan dalam model di penelitian ini. Untuk itu diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel interaksi antara digitalisasi dan inklusi keuangan.

Pemanfaatan teknologi bagi sektor keuangan tidak hanya memberi dampak positif tetapi juga dampak buruk. Semakin banyak praktek kredit online dengan basis aplikasi pada *smartphone* adalah salah satu contohnya. Praktek-praktek tersebut Sebagian besar tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga tidak mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh OJK. Banyak masyarakat yang menjadi korban dalam praktek pinjaman online tersebut. Ini menunjukkan bahwa tidak selamanya akses terhadap kredit berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Sehingga cukup menarik untuk mengkaji dampak pemanfaatan pinjaman online berbasis aplikasi ini terhadap kesejahteraan masyarakat. Tetapi dalam penelitian ini dibatasi kredit yang diterima adalah dari lembaga keuangan formal seperti bank dan koperasi yang ada dibawah naungan OJK karena ketersediaan data yang terbatas. Oleh sebab itu disarankan kepada peneliti berikutnya untuk mengkaji dampak pinjaman online ini bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

